



P-ISSN: 2716-2656, E-ISSN: 2985-9638

JOURNAL MARINE INSIDE

VOLUME 7, ISSUE. 2, DECEMBER 2025

Web: <https://ejournal.polteknepel-banten.ac.id/index.php/ejmi/>

Peran Balai Kekarantinaan Kesehatan dalam penerbitan *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)* sebagai persyaratan surat persetujuan berlayar di PT. Wistara Shipping Agency

Patrisius Marbun*, Maria Ulpa, Satria

Program Studi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan
Universitas Sanz Magnatya Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

E-mail: [*cious.marbun@gmail.com](mailto:cious.marbun@gmail.com)

ABSTRAK

Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) memiliki peran strategis dalam menjamin kesehatan kapal, awak kapal, dan lingkungan pelabuhan melalui penerbitan *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)* sebagai salah satu persyaratan utama penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Agen pelayaran berperan sebagai penghubung antara kapal dan instansi terkait dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis tersebut. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang dapat mempengaruhi kelancaran proses penerbitan PHQC. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Balai Kekarantinaan Kesehatan dalam proses penerbitan PHQC sebagai persyaratan SPB di PT. Wistara Shipping Agency serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerbitan PHQC oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Sumatera Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dimulai dari pengajuan permohonan oleh agen pelayaran, pemeriksaan fisik kapal dan kelengkapan dokumen kesehatan, hingga penerbitan PHQC. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan berupa keterlambatan pembaruan dokumen kesehatan kapal serta kendala teknis jaringan dalam pengajuan melalui sistem SINKARKES. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait dalam meningkatkan efektivitas pelayanan karantina kesehatan guna mendukung keselamatan dan kelancaran operasional pelayaran.

Kata Kunci: Balai Kekarantinaan Kesehatan, *Port Health Quarantine Clearance*, surat persetujuan berlayar, agen pelayaran, karantina kesehatan.

ABSTRACT

The Health Quarantine Office plays a strategic role in ensuring the health of ships, crews, and port environments through the issuance of the *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)* as one of the main requirements for obtaining a *Sailing Approval Letter (SPB)*. Shipping agencies act as intermediaries between vessels and relevant authorities in fulfilling both administrative and technical requirements. However, in practice, several obstacles may affect the effectiveness of the PHQC issuance process. This study aims to analyze the role of the Health Quarantine Office in issuing PHQC as a requirement for SPB at PT. Wistara Shipping Agency and to identify the constraints encountered during its implementation. This research employs a qualitative descriptive method, with data collected through interviews, observations, literature reviews, and documentation. The results indicate that the PHQC issuance process conducted by the Class I Health Quarantine Office of South Sumatra has been



Journal Marine Inside is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

implemented in accordance with established procedures, starting from the submission of applications by shipping agents, followed by physical inspections and verification of ship health documents, to the issuance of PHQC. Nevertheless, obstacles remain, including delays in updating ship health documents and technical issues related to internet connectivity during submissions through the SINKARKES system. The findings of this study are expected to serve as an evaluation reference for relevant stakeholders in improving the effectiveness of health quarantine services to support maritime safety and operational efficiency.

Keywords: *Health Quarantine Office, Port Health Quarantine Clearance, sailing approval letter, shipping agency, health quarantine.*

Tersedia pada: <https://doi.org/10.62391/ejmi.v7i2.151>

Disubmit pada 30/10/2025	Direview pada 10/11/2025	Direvisi pada 20/11/2025
Diterima pada 30/11/2025	Diterbitkan pada 01/12/2025	

PENDAHULUAN

Pelayanan karantina kesehatan kapal merupakan salah satu komponen strategis dalam sistem keselamatan dan kesehatan maritim global. Aktivitas pelayaran internasional dan domestik memiliki potensi tinggi sebagai media penyebaran penyakit menular lintas batas, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan kesehatan yang ketat terhadap kapal, awak kapal, serta lingkungan pelabuhan [1-2]. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) melalui *International Health Regulations (IHR) 2005* menegaskan bahwa setiap negara wajib memiliki kapasitas inti di pintu masuk internasional, termasuk pelabuhan laut, untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menyebar secara internasional [3].

Dalam konteks tersebut, pemeriksaan kesehatan kapal dan penerbitan sertifikat kesehatan kapal menjadi instrumen utama dalam menjamin bahwa kapal yang datang atau akan berlayar tidak membawa faktor risiko kesehatan. WHO menetapkan dokumen *Ship Sanitation Control Certificate (SSCC)* dan *Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC)* sebagai bukti bahwa kapal telah melalui proses inspeksi sanitasi yang memadai [4]. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh otoritas pelabuhan terkait pemberian izin sandar maupun izin berlayar, serta sebagai bagian dari sistem perlindungan kesehatan global di sektor transportasi laut [5].

Di Indonesia, ketentuan internasional tersebut diadopsi dan diintegrasikan ke dalam sistem nasional melalui penerbitan *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)* oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK). PHQC merupakan dokumen kesehatan kapal yang menjadi salah satu persyaratan utama dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh syahbandar [6]. Keberadaan PHQC menegaskan bahwa kapal telah memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan, baik dari aspek sanitasi, kesehatan awak kapal, maupun pengendalian faktor risiko penyakit menular di lingkungan kapal dan pelabuhan [7].

Peran Balai Kekarantinaan Kesehatan dalam penerbitan PHQC bersifat krusial karena berada pada titik temu antara kepentingan keselamatan pelayaran, kesehatan masyarakat, dan kelancaran operasional pelabuhan. BKK tidak hanya berfungsi sebagai penerbit dokumen administratif, tetapi juga sebagai pelaksana inspeksi kesehatan kapal secara langsung melalui

pemeriksaan fisik kapal, verifikasi dokumen kesehatan, serta pengawasan terhadap potensi vektor penyakit [8]. Literatur internasional menunjukkan bahwa efektivitas inspeksi sanitasi kapal sangat bergantung pada kompetensi petugas, standar prosedur operasional yang jelas, serta konsistensi pelaksanaan inspeksi di lapangan [9-10].

Dalam praktik operasional, agen pelayaran memiliki peran penting sebagai penghubung antara pihak kapal dengan instansi pemerintah, termasuk Balai Kekarantinaan Kesehatan. Agen pelayaran bertanggung jawab menyiapkan dan mengajukan dokumen kesehatan kapal, menjadwalkan pemeriksaan, serta memastikan seluruh persyaratan administrasi terpenuhi sebelum pengajuan SPB [11]. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kualitas kinerja agen pelayaran dalam memenuhi persyaratan kesehatan kapal sangat memengaruhi kecepatan dan kelancaran proses penerbitan PHQC [12].

Seiring perkembangan teknologi informasi, pemerintah Indonesia mengembangkan Sistem Informasi Karantina Kesehatan (SINKARKES) sebagai platform digital untuk mendukung pelayanan karantina kesehatan, termasuk pengajuan PHQC secara daring [13]. Digitalisasi layanan ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses pelayanan. Namun demikian, berbagai studi mencatat bahwa implementasi sistem digital di sektor pelabuhan masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur jaringan, kesiapan sumber daya manusia, serta perbedaan tingkat literasi digital antar pengguna layanan [14-15].

Berbagai penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa proses penerbitan PHQC pada umumnya telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan, namun masih dihadapkan pada sejumlah hambatan operasional. Hambatan tersebut antara lain keterlambatan pembaruan dokumen kesehatan kapal, gangguan jaringan internet saat pengajuan melalui sistem SINKARKES, serta kondisi cuaca yang menghambat pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal [16], [17]. Kondisi ini berpotensi menyebabkan keterlambatan penerbitan PHQC yang pada akhirnya berdampak pada keterlambatan keberangkatan kapal dan peningkatan biaya operasional [18].

Dari perspektif kesehatan masyarakat, pentingnya pengawasan kesehatan kapal semakin mengemuka seiring dengan berbagai kasus wabah penyakit yang terjadi di atas kapal, seperti norovirus, penyakit berbasis air, hingga COVID-19 pada kapal pesiar dan kapal niaga [19-21]. Studi-studi tersebut menegaskan bahwa kapal merupakan lingkungan tertutup dengan risiko penularan penyakit yang tinggi apabila standar sanitasi dan kesehatan tidak dipenuhi secara konsisten. Oleh karena itu, sertifikasi kesehatan kapal, termasuk PHQC, memiliki peran strategis dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di sektor maritim [22].

Selain aspek teknis dan kesehatan, koordinasi antarinstansi di pelabuhan juga menjadi faktor penentu efektivitas penerbitan PHQC. Ketidaksinkronan jadwal pemeriksaan, perbedaan interpretasi regulasi, serta kurangnya integrasi sistem informasi antarinstansi sering kali menimbulkan duplikasi proses dan inefisiensi pelayanan [23-24]. Literatur kebijakan maritim menekankan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor dan penerapan konsep *single window* untuk mendukung kelancaran pelayanan kapal di pelabuhan [25].

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun kerangka regulasi dan prosedur penerbitan PHQC telah tersedia, implementasinya di tingkat operasional masih memerlukan evaluasi dan penguatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Balai Kekarantinaan Kesehatan dalam penerbitan Port Health Quarantine Clearance (PHQC) sebagai persyaratan Surat Persetujuan Berlayar di PT. Wistara Shipping Agency, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas pelayanan karantina kesehatan di pelabuhan serta menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya di bidang keselamatan dan kesehatan maritim [26-30].

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses, peran institusi, serta praktik operasional penerbitan *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC) yang melibatkan interaksi antaraktor dan implementasi kebijakan di lapangan. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mekanisme penerbitan PHQC oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) sebagai persyaratan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), termasuk hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya [1-2, 14]. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya di bidang pelayanan publik maritim dan karantina kesehatan kapal yang menekankan pentingnya analisis proses dan kebijakan secara kontekstual, bukan sekadar pengukuran kuantitatif [16, 23].

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di PT. Wistara Shipping Agency, sebuah perusahaan agen pelayaran yang berperan aktif dalam pengurusan dokumen kesehatan kapal dan koordinasi dengan Balai Kekarantinaan Kesehatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keterlibatan langsung perusahaan dalam proses pengajuan PHQC dan relevansinya sebagai representasi praktik keagenan kapal di pelabuhan Indonesia [14, 16]. Penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2025, yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, analisis data, serta penyusunan laporan penelitian.

Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah proses penerbitan *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC) sebagai bagian dari persyaratan administratif dan kesehatan kapal sebelum penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Fokus objek mencakup alur prosedur, mekanisme pemeriksaan, serta koordinasi antarinstansi yang terlibat.

Subjek penelitian meliputi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses tersebut, yaitu staf operasional PT. Wistara Shipping Agency yang menangani pengurusan PHQC serta pihak terkait yang memahami prosedur dan kebijakan karantina kesehatan kapal. Pemilihan subjek dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan berdasarkan tingkat keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap proses penerbitan PHQC. Teknik ini umum digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data yang mendalam dan relevan dengan fokus penelitian [18, 24].

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali informasi mendalam mengenai

prosedur pengajuan PHQC, peran masing-masing pihak, serta kendala yang dihadapi dalam praktik operasional. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang fleksibel namun tetap terarah pada fokus penelitian [14, 23].

Selain itu, observasi langsung dilakukan terhadap aktivitas administrasi pengurusan PHQC di PT. Wistara Shipping Agency, termasuk penggunaan sistem SINKARKES dan pola koordinasi dengan Balai Kekarantinaan Kesehatan. Observasi ini bertujuan menangkap kondisi empiris di lapangan secara nyata [13].

Studi pustaka dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, pedoman teknis WHO, serta artikel ilmiah bereputasi yang berkaitan dengan karantina kesehatan kapal, inspeksi sanitasi, dan keselamatan pelayaran [1, 3-4, 19-22]. Selanjutnya, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui penelaahan dokumen resmi, seperti formulir pengajuan PHQC, dokumen kesehatan kapal, dan arsip administrasi yang relevan.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis tematik. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilahan dan penyederhanaan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar selaras dengan fokus penelitian. Tahap ini melibatkan pengkodean awal dan identifikasi tema-tema utama terkait peran BKK, alur penerbitan PHQC, serta hambatan yang muncul [23-24].

Tahap berikutnya adalah penyajian data, yaitu penyusunan data dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan logis untuk memudahkan penafsiran. Pada tahap ini, temuan disusun berdasarkan alur proses penerbitan PHQC dan hubungan antaraktor yang terlibat [26]. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu interpretasi data untuk menjawab tujuan penelitian serta memastikan konsistensi temuan melalui pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan [16, 23].

Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui penerapan triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dari berbagai informan. Teknik triangulasi ini bertujuan meningkatkan kredibilitas dan keandalan temuan penelitian [24-25].

Selain itu, peneliti juga melakukan member check, yakni mengonfirmasi kembali ringkasan hasil wawancara dan temuan utama kepada informan kunci untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan kondisi empiris yang sebenarnya. Langkah ini penting untuk meminimalkan bias subjektif dan meningkatkan validitas hasil penelitian [23-24].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Balai Kekarantinaan Kesehatan dalam Penerbitan Port Health Quarantine Clearance (PHQC)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) memiliki peran sentral dalam menjamin terpenuhinya aspek kesehatan kapal sebelum penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Peran tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup fungsi pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian risiko kesehatan kapal. Temuan ini sejalan dengan ketentuan *International Health Regulations (IHR) 2005* yang menegaskan

keajiban negara untuk memastikan kapal bebas dari faktor risiko kesehatan sebelum diberi izin berlayar atau memasuki pelabuhan lain [1, 3].

Dalam praktik di PT. Wistara Shipping Agency, BKK melaksanakan pemeriksaan kesehatan kapal melalui verifikasi dokumen kesehatan dan inspeksi fisik kapal. Dokumen yang diverifikasi meliputi *Ship Health Book*, *Certificate of Free Pratique* (COP), serta sertifikat sanitasi kapal. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk memastikan kondisi sanitasi kapal, kebersihan ruang awak, pengelolaan limbah, serta potensi keberadaan vektor penyakit. Proses ini mencerminkan fungsi BKK sebagai *gatekeeper* kesehatan pelabuhan sebagaimana direkomendasikan oleh WHO dan literatur kesehatan maritim [4, 9].

Secara regulatif, peran BKK dalam penerbitan PHQC memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang menyatakan bahwa kapal yang tidak memenuhi persyaratan karantina kesehatan tidak dapat diberikan izin berlayar [6]. Dengan demikian, PHQC berfungsi sebagai instrumen pengendalian kesehatan sekaligus sebagai prasyarat administratif yang mengikat bagi proses penerbitan SPB oleh syahbandar [7].

Mekanisme Penerbitan PHQC sebagai Persyaratan Surat Persetujuan Berlayar

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, mekanisme penerbitan PHQC di PT. Wistara Shipping Agency diawali dengan pengajuan permohonan oleh agen pelayaran melalui sistem SINKARKES. Agen pelayaran bertindak sebagai pihak yang menyiapkan dan mengunggah dokumen kesehatan kapal, sekaligus menjadwalkan pemeriksaan oleh petugas BKK. Peran agen pelayaran ini sangat menentukan kelancaran proses karena kelengkapan dan keakuratan dokumen menjadi faktor utama dalam tahap verifikasi awal [11-12].

Tabel 1. Peran Balai Kekarantinaan Kesehatan dan mekanisme penerbitan PHQC.

No	Tahap / Aspek	Pelaksana	Uraian Kegiatan	Output
1	Pengajuan Permohonan	Agen Pelayaran	Pengajuan PHQC melalui sistem SINKARKES dan unggah dokumen kesehatan kapal	Permohonan terdaftar
2	Verifikasi Administratif	BKK	Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen (Ship Health Book, COP, sertifikat sanitasi)	Dokumen tervalidasi
3	Inspeksi Fisik Kapal	BKK	Pemeriksaan sanitasi kapal, kebersihan, dan potensi risiko kesehatan	Berita acara pemeriksaan
4	Penilaian Risiko Kesehatan	BKK	Evaluasi kondisi kesehatan kapal sesuai standar karantina	Rekomendasi kelayakan
5	Penerbitan PHQC	BKK	Penerbitan Port Health Quarantine Clearance (PHQC)	PHQC diterbitkan
6	Penerbitan SPB	Syahbandar	Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar	Kapal diizinkan berlayar

Setelah permohonan diterima, petugas BKK melakukan pemeriksaan administratif dan inspeksi fisik kapal. Apabila seluruh persyaratan terpenuhi dan tidak ditemukan risiko kesehatan yang signifikan, PHQC diterbitkan dalam jangka waktu tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa alur penerbitan PHQC telah berjalan sesuai dengan standar pelayanan dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan WHO [3, 8].

Namun demikian, dari sisi analitis, mekanisme ini masih sangat bergantung pada

efektivitas koordinasi antarinstansi dan kesiapan sistem informasi. Literatur menunjukkan bahwa keterlambatan dalam salah satu tahapan, khususnya pada tahap pengajuan elektronik atau inspeksi fisik, dapat berdampak langsung pada keterlambatan keberangkatan kapal dan peningkatan biaya operasional [14, 18]. Dengan demikian, mekanisme penerbitan PHQC perlu dipahami tidak hanya sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai bagian dari sistem pelayanan terpadu pelabuhan.

Analisis Hambatan dalam Proses Penerbitan PHQC

Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa hambatan utama dalam proses penerbitan PHQC di PT. Wistara Shipping Agency. Hambatan pertama adalah keterlambatan pembaruan dokumen kesehatan kapal, seperti masa berlaku *Ship Health Book* atau sertifikat sanitasi kapal. Keterlambatan ini menyebabkan proses verifikasi oleh BKK tertunda karena dokumen harus diperbarui terlebih dahulu sebelum PHQC dapat diterbitkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kepatuhan administrasi agen pelayaran sangat mempengaruhi efektivitas pelayanan karantina kesehatan kapal [12, 14].

Hambatan kedua berkaitan dengan kendala teknis sistem SINKARKES, khususnya gangguan jaringan internet dan keterbatasan akses sistem pada waktu tertentu. Ketergantungan pada sistem berbasis daring menjadikan stabilitas jaringan sebagai faktor krusial dalam kelancaran proses penerbitan PHQC. Studi-studi terkait digitalisasi pelayanan publik di sektor kesehatan dan maritim menunjukkan bahwa tanpa dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, sistem elektronik justru dapat menjadi sumber inefisiensi baru [15-16].

Hambatan ketiga adalah kondisi cuaca dan faktor operasional di lapangan, yang dapat menghambat pelaksanaan inspeksi fisik kapal oleh petugas BKK. Kondisi ini terutama terjadi ketika kapal berada di area labuh atau saat cuaca buruk, sehingga inspeksi harus ditunda. Literatur kesehatan maritim mencatat bahwa inspeksi fisik kapal merupakan tahapan krusial dalam pencegahan penyakit, sehingga penundaan inspeksi berpotensi meningkatkan risiko kesehatan jika tidak dikelola dengan prosedur mitigasi yang tepat [9, 19].

Tabel 2. Hambatan penerbitan PHQC dan rekomendasi perbaikan operasional.

No	Jenis Hambatan	Temuan Lapangan	Dampak	Rekomendasi
1	Administratif	Dokumen kesehatan kapal kedaluwarsa	Penundaan PHQC	Monitoring masa berlaku dokumen oleh agen
2	Teknis Sistem	Gangguan jaringan SINKARKES	Proses pengajuan terhambat	Penguatan infrastruktur & backup sistem
3	Operasional Lapangan	Cuaca buruk menghambat inspeksi	Penjadwalan ulang pemeriksaan	SOP inspeksi adaptif & koordinasi awal
4	Koordinasi	Ketidaksinkronan antarinstansi	Waktu layanan lebih lama	Penguatan koordinasi lintas instansi

Pembahasan dalam Perspektif Regulasi dan Keselamatan Pelayaran

Jika dianalisis dari perspektif regulasi, temuan penelitian menunjukkan bahwa proses penerbitan PHQC di PT. Wistara Shipping Agency pada dasarnya telah sesuai dengan kerangka hukum nasional dan internasional. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup baik terhadap ketentuan UU Kekarantinaan Kesehatan dan *International Health Regulations* [1, 6]. Namun, kepatuhan regulatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi aspek operasional dan teknologi.

Dari perspektif keselamatan pelayaran, PHQC memiliki implikasi langsung terhadap keselamatan awak kapal dan kelancaran operasi pelayaran. Berbagai studi internasional

mengenai wabah penyakit di kapal menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan kesehatan kapal dapat berdampak serius terhadap keselamatan manusia dan reputasi pelabuhan [19–21]. Oleh karena itu, peran BKK dalam penerbitan PHQC tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam sistem keselamatan pelayaran nasional.

Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa peningkatan kualitas pelayanan PHQC memerlukan pendekatan sistemik, meliputi penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan keandalan sistem informasi, serta penguatan koordinasi antarinstansi di pelabuhan. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi literatur kebijakan maritim yang menekankan pentingnya integrasi layanan dan *single window system* untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan pelayaran [23, 25].

Implikasi Temuan Penelitian

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan peran proaktif agen pelayaran dalam memastikan kelengkapan dan validitas dokumen kesehatan kapal sebelum pengajuan PHQC. Selain itu, BKK perlu terus memperkuat kapasitas teknis dan operasional, khususnya dalam pemanfaatan sistem digital dan pelaksanaan inspeksi lapangan. Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait dalam menyempurnakan standar pelayanan penerbitan PHQC agar lebih adaptif terhadap tantangan operasional di pelabuhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) memiliki peran strategis dalam penerbitan *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC) sebagai persyaratan utama penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Peran tersebut tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, tetapi juga mencakup pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan sanitasi kapal sebagai upaya pencegahan masuk dan keluarnya risiko penyakit melalui jalur pelayaran.

Proses penerbitan PHQC di PT. Wistara Shipping Agency pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang berlaku, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Mekanisme pengajuan, pemeriksaan dokumen, inspeksi fisik kapal, hingga penerbitan PHQC menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup baik terhadap standar pelayanan karantina kesehatan kapal.

Namun demikian, penelitian ini menemukan beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitas proses penerbitan PHQC, yaitu keterlambatan pembaruan dokumen kesehatan kapal, kendala teknis pada sistem SINKARKES, serta faktor operasional seperti kondisi cuaca yang menghambat pemeriksaan fisik kapal. Hambatan-hambatan tersebut berpotensi menimbulkan keterlambatan keberangkatan kapal dan berdampak pada efisiensi operasional pelayaran apabila tidak dikelola secara optimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang bersifat operasional dan aplikatif dapat disampaikan sebagai berikut. Agen pelayaran disarankan untuk meningkatkan kedisiplinan administrasi dengan melakukan pemantauan masa berlaku dokumen kesehatan kapal secara berkala agar proses pengajuan PHQC dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu. Balai Kekeparantaraan Kesehatan perlu memperkuat dukungan teknis dan operasional, khususnya dalam peningkatan keandalan sistem SINKARKES serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan inspeksi kesehatan kapal. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi di pelabuhan, termasuk syahbandar dan otoritas pelabuhan, guna meminimalkan hambatan prosedural dan meningkatkan efisiensi pelayanan penerbitan SPB.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian serupa dikembangkan dengan pendekatan komparatif pada beberapa pelabuhan atau dengan menambahkan analisis kuantitatif terkait waktu pelayanan dan dampak ekonomi keterlambatan penerbitan PHQC, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas sistem karantina kesehatan kapal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] World Health Organization. (2005). *International Health Regulations (2005)* (3rd ed.). Geneva: WHO Press. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241580496>.
- [2] Mouchtouri, V. A., Nichols, G., Rachiotis, G., Kremastinou, J., & Hadjichristodoulou, C. (2010). State of the art: Public health and passenger ships. *International Maritime Health*, 61(2), 49–98. https://journals.viamedica.pl/international_maritime_health.
- [3] World Health Organization. (2011). *Handbook for inspection of ships and issuance of ship sanitation certificates*. Geneva: WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HSE-GAR-BDP-2011.3>.
- [4] Rooney, R. M., Cramer, E. H., Mantha, S., Nichols, G., Bartram, J. K., Farber, J. M., & Benembarek, P. K. (2004). A review of outbreaks of foodborne disease associated with passenger ships: Evidence for risk management. *Public Health Reports*, 119(4), 427–434. <https://doi.org/10.1016/j.phr.2004.04.004>.
- [5] Cramer, E. H., Gu, D. X., Durbin, R. E., & Vessel Sanitation Program Environmental Health Inspection Team. (2003). Diarrheal disease on cruise ships, 1990–2000: The impact of environmental health programs. *American Journal of Preventive Medicine*, 24(3), 227–233. [https://doi.org/10.1016/S0749-3797\(02\)00601-1](https://doi.org/10.1016/S0749-3797(02)00601-1).
- [6] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekeparantaraan Kesehatan*. Jakarta. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- [7] Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar*. Jakarta.
- [8] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantaraan Kesehatan*. Jakarta.
- [9] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal*. Jakarta.
- [10] Hadjichristodoulou, C., Mouchtouri, V. A., Guglielmetti, P., Lemos, C. M., Nichols, G., & Pirnat, N. (2012). Actions for prevention and control of health threats related to maritime transport. *International Maritime Health*, 63(4), 201–209.
- [11] Mulyawa, E., Firman, & Diarto, A. (2019). Prosedur clearance in dan clearance out kapal tanker milik PT Pertamina oleh PT Pertamina Trans Kontinental Cabang Merak. *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim*, 1(1), 1–10.

- [12] Dani, A. (2019). Implementasi kebijakan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 87–96.
- [13] Enzelika, E., & Ginting, D. (2024). Proses penerbitan billing PNPB Certificate of Free Pratique (COP) dan Port Health Quarantine Clearance (PHQC) melalui sistem SINKARKES. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(4), 1203–1212.
- [14] Nainggolan, R., & Sabila, F. H. (2024). Proses penerbitan dokumen Port Health Quarantine Clearance (PHQC) kesehatan kapal pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I. *Jurnal Riset Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 2(5), 889–899. <https://journal.arimbi.or.id>.
- [15] Gusfriyanto, F., Rizanda, M., & Edison. (2019). Analisis pelaksanaan program pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 8(2), 302–310. <https://doi.org/10.25077/jka.v8.i2.p302-310.2019>.
- [16] Yamin, K., & Suryadi, A. (2024). Analisis implementasi sistem informasi karantina kesehatan (SINKARKES) pada pelayanan kapal. *Jurnal Sistem Informasi Kesehatan*, 5(1), 45–54.
- [17] Sembiring, J. (2023). Pelayanan penerbitan Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) di pelabuhan laut. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 15(3), 156–164.
- [18] [18] Mustar, Y. (2021). Ship sanitation: Controlling and preventing health risk factors on vessels. *International Journal of Environmental Health Research*, 31(6), 731–742. <https://doi.org/10.1080/09603123.2019.1709324>.
- [19] Kordsmeyer, A. C., et al. (2021). Systematic review on outbreaks of SARS-CoV-2 on cruise, navy and cargo ships. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(10), 5195. <https://doi.org/10.3390/ijerph18105195>.
- [20] Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Public health responses to COVID-19 outbreaks on cruise ships. *MMWR*, 69(12), 347–352. <https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6912e3>.
- [21] Zhang, W., et al. (2022). COVID-19 outbreaks on ships: A systematic analysis. *The Lancet Regional Health – Western Pacific*, 19, 100360. <https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100360>.
- [22] Anagnostopoulos, A., Mouchtouri, V. A., & Hadjichristodoulou, C. (2025). Infectious disease prevention and control on ships: A scoping review. *Travel Medicine and Infectious Disease*, 54, 102702. <https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2023.102702>.
- [23] Nichols, G. L., et al. (2017). Ports, shipping and infectious disease risks. *Eurosurveillance*, 22(20), 30570. <https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2017.22.20.30570>.
- [24] Pirnat, N., et al. (2018). Ship sanitation certificates and the International Health Regulations. *Journal of Travel Medicine*, 25(1), tay013. <https://doi.org/10.1093/jtm/tay013>.
- [25] United Nations Conference on Trade and Development. (2020). *Review of maritime transport 2020*. Geneva: UNCTAD. <https://unctad.org>.
- [26] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2022). *Standar Pelayanan Penerbitan Port Health Quarantine Clearance (PHQC)*. Jakarta.
- [27] Sari, D. P., & Rahman, F. (2022). Hygiene and sanitation inspection of ships in Indonesian ports. *Kesmas: National Public Health Journal*, 17(1), 23–30. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v17i1.5632>.
- [28] Lemos, C. M., et al. (2019). Water safety plans on ships. *International Maritime Health*, 70(3), 159–167.
- [29] RIVM & WHO Collaborating Centre. (2018). *European web-based information system*

for ship sanitation certificates. Bilthoven.

- [30] Politeknik Pelayaran Indonesia. (2025). Sistem SINKARKES dalam penerbitan PHQC dan SSCEC pada kapal niaga. *Jurnal Transportasi Maritim Indonesia*, 7(1), 55–66.